

## STRATEGI PENYUSUNAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH<sup>1</sup>

Catur Sugiyanto

Universitas Gadjah Mada

### ABSTRACT

*This paper evaluates the determination of competitive products implemented by local government. We use the five aspects of business feasibility and the Revealed Comparative Advantages (RCA) analysis. The five aspects include marketing, financial, technique and production, management and legal, and social and environmental aspects. The RCA measures comparative advantages of a product in a region in compare to its competitor within the same province. The paper found the competitive product selection implemented by the local government are not always inline with the five aspects of business feasibility and the RCA. The use of the the 5 aspects can help the banking sector to finance the competitive products and the use of the RCA can increase the possibility of the sector to help solving the local economic problems.*

**Keywords:** *Komoditi Unggulan, AHP, Location Quation, Jawa Tengah*

### LATAR BELAKANG

Penentuan komoditas unggulan daerah merupakan salah satu faktor kunci pengembangan ekonomi daerah. Kenyataan ini diakui hampir di semua daerah, terbukti setiap daerah mempunyai komoditas unggulan. Namun demikian, tidak semua daerah sukses dalam mengembangkan komoditas unggulan di daerahnya. Hal ini ditandai oleh masih rendahnya komoditas unggulan daerah yang memperoleh pembiayaan dari perbankan. Berdasarkan hasil penelitian KBI Semarang (2002), diketahui bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) pada umumnya memperoleh pembiayaan kurang dari 30 persen modal kerjanya dengan menggunakan fasilitas perbankan. Apabila akses UKM pada perbankan meningkat, kondisi ini memungkinkan UKM mampu berkembang sebagai pelaku ekonomi yang handal.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurai masalah tersebut. Misalnya, Bank Indonesia menyediakan hasil penelitian berupa *lending model* untuk membantu daerah dalam mengembangkan komoditinya agar bisa lebih menarik bagi perbankan (Bank Indonesia No.9/ 9 /PSHM/Humas 7 Feb 2007). Dalam kesempatan ini, Gubernur Bank Indonesia menyerahkan hasil penelitian tentang Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat, mengingatkan kembali komitmen Bank Indonesia untuk membantu daerah. Demikian pula, kegiatan Kantor Bank Indonesia Semarang bekerjasama dengan PSEKP UGM untuk mengembangkan model pinjaman (*lending model*) di 14 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk

---

<sup>1</sup> Paper ini dikembangkan dari Penelitian PSE-KP UGM bekerjasama dengan Kantor Bank Indonesia Semarang mengenai Lending Model 70 Produk Unggulan di Jawa Tengah 2006. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Bank Indonesia Semarang dan PSE-KP UGM atas kesempatan melaksanakan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada asisten peneliti PSE-KP UGM atas kerjasamanya selama ini. Kesalahan dan Kealpaan dalam paper ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

70 komoditi unggulan daerah (PSEKP-BI, 2006) dan Bagian Kredit Kantor Pusat Bank Indonesia membuat lending model untuk 10 komoditi (PSEKP-BI, 2005).

Dari hasil penelitian terhadap 70 komoditi (dari 14 kabupaten/kota) di Jawa Tengah tersebut di atas terungkap bahwa ada perbedaan antara metode penentuan komoditas unggulan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan yang ditetapkan oleh perbankan. Perbedaan tersebut mengakibatkan tidak semua komoditas unggulan daerah bisa mencerminkan komoditas yang layak dibiayai program pengembangannya oleh perbankan. Kajian ini mengungkapkan perbedaan-perbedaan tersebut. Selain itu, kajian ini juga menggaris bawahi pilihan yang bisa diambil oleh daerah untuk menentukan komoditas unggulan berdasarkan kepentingan daerah. Kajian ini menggunakan analisis komoditas unggulan dengan kasus di Jawa Tengah sebagai ilustrasi.

### METODE ANALISIS PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH

Penetapan komoditi unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah biasanya berdasarkan potensi daerah. Namun demikian, tidak terlalu jelas bagaimana sebenarnya suatu komoditi (ditetapkan) menjadi komoditi unggulan daerah. Ada daerah yang menggunakan produk khas (misalnya salak pondoh, tempat wisata), jumlah usaha (gula aren, gerabah, kulit), banyak menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Bahkan, ada daerah yang komoditi unggulannya ditentukan bias terhadap instansi/dinas yang ada (dinas pertanian menyebut padi, peternakan menyebut penggemukan sapi, perikanan menyebut ikan air tawar, dan sebagainya). Akibatnya, pengembangan komoditi unggulan menjadi tidak fokus dan spesialisasi daerah tidak terwujud.

Dari analisis di atas dan informasi lain (kepentingan daerah, visi misi kepada daerah dsb), pemerintah kabupaten dan kota menetapkan komoditi unggulan mewakili sektor masing-masing yang ditetapkan oleh Pemda maupun Dinas Terkait. Pada komponen ini, suatu komoditi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu **Prioritas Tinggi (PT)**, **Prioritas Sedang (PS)**, dan **Prioritas Rendah (PR)** berdasarkan kebijakan Pemda dalam prioritas pengembangan komoditi dimaksud.

Selain analisis di atas, Bank Indonesia melakukan survei potensi dasar (*Baseline Survei*) terhadap usaha (Usaha Kecil Menengah, UKM) di daerah. Dalam survei ini dilakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan lima aspek sebagai berikut: (1) aspek pasar dan pemasaran, (2) aspek teknis dan produksi, (3) aspek sosial ekonomi dan lingkungan, (4) aspek manajemen dan legalitas, (5) aspek keuangan (BI-PSEKP-UGM, 2005). Hasilnya, unit usaha (usaha dalam bidang komoditi) tertentu dinilai sangat potensial, potensial atau kurang potensial. Klasifikasi usaha dalam kategori sangat potensial, potensial atau kurang potensial dilakukan berdasarkan *scoring* yang dilakukan terhadap pemilik dan yang berkaitan dengan usaha tersebut, misalnya bank dan Pemda setempat. Klasifikasi dan analisis yang dilakukan dalam survay potensi dasar mendekati analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank untuk memutuskan apakah membiayai suatu unit usaha atau tidak. Di dalam survei potensi dasar, Bank Indonesia mengelompokkan komoditi menjadi komoditi sangat potensial (SP), potensial (P) dan kurang potensial (KP)

Apabila kedua proses ini (penentuan komoditas prioritas daerah dan survei Bank Indonesia) digabungkan maka dapat diperoleh tabel 1 seperti berikut ini.

**Tabel 1.** Matriks Penentuan Komoditi Unggulan Daerah

Matriks Penentuan Komoditi SU,	Hasil Penelitian BLS
--------------------------------	----------------------

U dan KU		SP	P	KP
Persepsi Pemda	PT	SU	SU	U
	PS	SU	U	KU
	PR	U	KU	KU

Sumber: BI-PSEKP-UGM, 2005

Dari tabel 1 nampak bahwa hanya terdapat tiga kelompok komoditi yang menghasilkan peringkat sama antara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu kategori PT-SP, PS-P dan PR-KP. Selain itu, karena metode penentuan peringkat yang berbeda, maka belum tentu dalam tiga kelompok tersebut terdapat komoditi yang sama. Dengan demikian nampak bahwa kemungkinan besar terjadi tidak sinkron antara hasil peringkat Bank Indonesia dengan hasil dari pemerintah daerah.

Proses MFEP (*Multi Factor Evaluation Process*) dipergunakan dalam menentukan bobot penting dari tiap-tiap sumber data<sup>2</sup>. Proses MFEP dilakukan dengan menempuh langkah-langkah:

1. Melakukan perbandingan secara berpasangan (*pairwise comparison*) dengan skala kepentingan 1 – 9.
2. Membuat rata-rata geometris dari hasil perbandingan secara berpasangan.
3. Menuangkan rata-rata geometris ke dalam matriks bujur sangkar dengan diagonal bernilai 1 yang berfungsi sebagai cermin. Nilai suatu kolom merupakan kebalikan dari hasil cerminan terhadap diagonal.
4. Menjumlahkan matriks bujur sangkar terserbut secara vertikal.
5. Membuat proporsi tiap baris dan kolom terhadap penjumlahan secara vertikal.
6. Membuat rata-rata proporsi secara horizontal, rata-rata tersebut merupakan bobot akhir dari hal-hal yang dibandingkan secara berpasangan.

Sumber informasi yang dilakukan pembobotan kepentingannya adalah:

- Hasil *Baseline Survei* (BLS) Jawa Tengah, kerja sama KBI Semarang dengan Universitas Diponegoro tahun 1995.
- Persepsi Pejabat Daerah (Kepala Badan dan Kepala Dinas).
- Data Sekunder Makro Ekonomi Daerah.

Data Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Perhitungan data SUSI dilakukan dengan metode LQ (*Location Quotion*)<sup>3</sup>.

Hasil dari proses MFEP penentuan tingkat prioritas data/informasi yang akan dipakai untuk menentukan produk unggulan. Dalam tabel 2 terlihat bahwa hasil MFEP menunjukkan informasi dari persepsi pejabat terkait menjadi prioritas utama dalam menentukan produk unggulan daerah.

**Tabel 2.** Bobot Prioritas Sumber Informasi

No	Sumber Informasi	Bobot
----	------------------	-------

<sup>2</sup> Dalam kasus ini Proses MFEP dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM dengan Tim Kantor Bank Indonesia Semarang. Detail dan hasil MFEP ada di dalam laporan penelitian, tidak dicantumkan dalam artikel ini untuk menghemat tempat.

<sup>3</sup> LQ mengukur seberapa jauh proporsi atau peran komoditi di suatu daerah di dalam total produksi daerah relative terhadap peran produk yang sama di daerah referensi. m

1	Persepsi Pejabat	33,94%
2	Survei BLS	25,07%
3	Data SUSI BPS	22,30%
4	Data Sekunder Daerah	18,69%
	Jumlah	100,00%

Sumber: BI-PSEKP-UGM, 2005

**Analisis 5 Aspek.** Suatu komoditas unggulan dinyatakan layak untuk dikembangkan/didanai oleh perbankan di suatu kabupaten/kota dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Sangat Layak (SL), Layak (L), dan Cukup Layak (CL), plus dan minus satu standar deviasi dari rata-rata, berdasarkan hasil scoring/pembobotan terhadap nilai 5 (lima) aspek/variabel yaitu:

1. Aspek pemasaran.
  - Prospek ke depan
  - Kemampuan mempengaruhi harga
  - Cara beriklan
  - Pesaing
  - Strategi pembedaan produk/jasa
  - Ada tidaknya kemitraan
2. Aspek teknis dan produksi.
  - Penggunaan Komputer
  - Perlu tidaknya Keahlian khusus
  - Standarisasi mutu produk
  - Ketersediaan bahan baku
  - Kelancaran pasokan bahan baku
3. Aspek manajemen dan legalitas;
  - Ada tidaknya struktur organisasi
  - Ada tidaknya uraian tugas
  - Pembagian tugas
  - Peningkatan kualitas karyawan
  - Ada tidaknya bonus bagi karyawan
  - Bentuk badan usaha
  - Ada tidaknya izin usaha
  - Ada tidaknya Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP)
4. Aspek keuangan;
  - Nilai Internal Rate of Return (IRR)
  - Nilai Net Present Value (NPV)
  - Tingkat profitabilitas
5. Aspek sosial ekonomi dan lingkungan.
  - Penyerapan tenaga kerja
  - Jumlah tenaga kerja
  - Prospek kesempatan kerja

- Ada tidaknya limbah.

Secara teoritis masing-masing aspek di atas dapat dirinci menurut komponen berikut. Pada aspek pemasaran, hal-hal yang dikaji mencakup: pangsa pasarnya (permintaan dan penawaran, harga/biaya, program pemasaran dan perkiraan penjualan), perkembangan pasar (faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan, karakteristik pasar seperti segmentasi, target dan posisi) serta persaingannya.

Aspek teknis dan produksi, evaluasi dilakukan terhadap rancangan arus produksi, studi/pengujian pendahuluan yang pernah dilakukan, optimasi skala produksi, ketepatan proses produksi yang dipilih, ketepatan pemilihan sarana produksi, penanganan limbah produksi, ketepatan tata letak fasilitas produksi, kesesuaian lokasi dan kajian sosial terhadap teknologi yang dipakai.

Dari aspek keuangan, penghitungan teknik valuasi atau penilaian ekonomi (*valuation technique*) yang digunakan untuk melihat kelayakan ekonomi dari suatu aktifitas ekonomi. Sebagai parameter kelayakan dapat digunakan analisis *Internal Rate of Return (IRR)*. *Internal Rate of Return (IRR)* adalah tingkat profitabilitas modal yang ditanam, baik modal sendiri maupun modal pinjaman atau bunga maksimum seluruh modal yang masih dapat dibayar oleh hasil proyek. IRR merupakan nilai discount rate  $i$  yang menyebabkan nilai NPV (*Net Present Value*) sama dengan nol. IRR juga dapat dianggap sebagai tingkat keuntungan dari investasi bersih suatu proyek. IRR dapat dihitung dengan cara:

$$IRR = i_1 + (i_2 - i_1) \times \frac{NPV_1}{(NPV_2 - NPV_1)}$$

IRR nilai internal rate of return dalam persentase

NPV1 Net Present Value pertama pada DF terkecil

NPV2 Net Present Value kedua pada DF terbesar

$i_1$  Tingkat suku bunga atau discount rate pertama

$i_2$  Tingkat suku bunga atau discount rate kedua

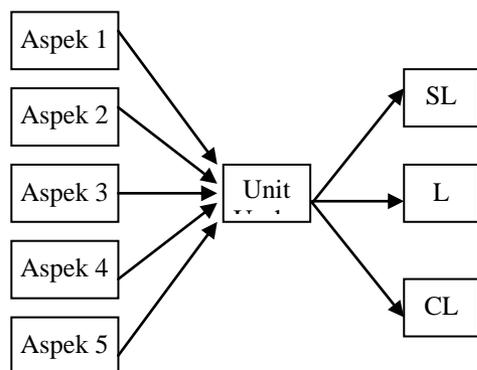
Jika nilai IRR sama atau lebih besar dari nilai tingkat suku bunga, maka suatu proyek dinyatakan layak. Sebaliknya, jika nilai IRR lebih kecil atau kurang dari tingkat suku bunga maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Tingkat suku bunga yang dipergunakan adalah trend suku bunga.

Dari aspek manajemen dan legalitas, kajian difokuskan pada aspek organisasi dalam operasional proses produksi seperti, bentuk dan struktur organisasi, deskripsi dan spesifikasi jabatan, personalia, jumlah SDM, bentuk badan hukum, jaminan terhadap pinjaman serta surat-surat legalitas lainnya seperti akta, sertifikat, izin yang diperlukan. Terakhir kajian kelayakan dari aspek keuangan mencakup: kebutuhan dana baik untuk investasi maupun modal kerja, sumber-sumber pendanaan, taksiran penghasilan, biaya dan rugi/laba, manfaat dan biaya (finansial) serta proyeksi keuangannya.

Dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, kajian mencakup kajian komoditas terhadap penghasilan negara, devisa (yang dapat dihemat dan yang bisa diperoleh), penambahan dan pemerataan kesempatan kerja, keterkaitan dengan industri lain dan kondisi sosial masyarakat

sekitar, seperti budaya masyarakat sekitar, tingkat perekonomiannya dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Secara diagramatik, kelima aspek di atas diterapkan pada suatu unit usaha, dan kemudian ditentukan tingkat kelayakan unit usaha tersebut, sebagaimana diagram berikut.



**Diagram 1.** Proses Penentuan Kelayakan Usaha

Penilaian indikator di atas menggunakan skala 1 sampai 3 yang kemudian dicari nilai rata-rata pada setiap aspek. Kategori kelayakan komoditas diklasifikasikan menjadi:

**Sangat Layak** : jika hasil penilaian lebih dari atau sama dengan dari rata-rata ditambah standar deviasi;

**Layak** : jika hasil penilaian antara lebih besar atau sama dengan rata-rata dikurangi standar deviasi dan kurang dari rata-rata ditambah standar deviasi;

**Cukup Layak** : jika hasil penilaian kurang dari rata-rata dikurangi standar deviasi.

**Analisisis RCA.** Sebagai alternatif, komoditi unggulan biasanya ditentukan berdasarkan kemampuan sektor/sub sektor/komoditi suatu daerah relatif terhadap produk yang sama di daerah yang cakupannya lebih tinggi (misalnya kalau kita melihat kabupaten/kota, maka referensinya adalah propinsi). Rumus yang biasa dipergunakan adalah rumus keunggulan komparatif (*Revealed Comparative Advantage-RCA*) sebagai berikut.

Rumus RCA

$$RCA = \frac{\frac{X_i^A}{X^A}}{\frac{X_i^W}{X^W}}$$

$X_i^A$  = Nilai produksi komoditas i di kabupaten/kota A

$X^A$  = Total Nilai Produksi seluruh komoditas di kabupaten/kota A

$X_i^W$  = Produksi komoditas i di Propinsi W

$X^W$  = Total Nilai Produksi seluruh komoditas di Propinsi W

1. Bila  $RCA > 1$  maka kabupaten/kota A mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi i LEBIH TINGGI dibanding kabupaten/kota lain yang ada di propinsi W.
2. Bila  $RCA < 1$  maka kabupaten/kota A TIDAK mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi i dibanding kabupaten/kota lain yang ada di propinsi W.
3. Bila  $RCA = 1$  maka kabupaten/kota A mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi i SAMA DENGAN kabupaten/kota lain yang ada di propinsi W.

Unsur yang dibandingkan dalam analisis di atas dapat berupa nilai produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah unit usaha maupun omset unit usaha. Apabila yang dicari adalah produk apa yang unggul di suatu daerah, maka  $X$  merupakan nilai produksi untuk komoditi  $i$ . Namun, bila unit usaha (misal UMKM) apa yang unggul di suatu daerah, maka tiga variabel (jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan omzet usaha) bisa dipergunakan sebagai pembanding. Dengan menggunakan tiga variabel ini maka kemungkinannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.** Kriteria Keunggulan Komoditi Berdasarkan RCA

Nilai $RCA > 1$			Keunggulan Unit usaha Dibandingkan dengan unit usaha lainnya dalam propinsi yang sama	
	Jumlah unit usaha	Jumlah tenaga kerja	Omzet usaha	
A	ya	ya	ya	Primadona: Jumlah unit usaha, daya serap tenaga kerja dan omset melebihi rata-rata unit yang ada di propinsi
B	ya	ya	tidak	Jumlah unit usaha relatif banyak dan mampu menyerap banyak tenaga kerja tapi lemah dalam pemasaran produk
C	ya	tidak	ya	Bukan unit usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, namun jumlah unit usahanya relatif banyak dan menguasai pasar
D	tidak	ya	ya	Beberapa unit usaha dalam skala besar, mampu menyerap tenaga kerja dan menguasai pasar
E	ya	tidak	tidak	Banyak unit usaha kecil yang lemah dalam pemasaran dan tidak banyak menyerap tenaga kerja
F	tidak	ya	tidak	Sedikit jumlah usaha kecil yang lemah daam pemasaan namun banyak tenaga kerja yang terserap (miskin)
G	tidak	tidak	ya	Beberapa unit usaha besar menguasai pemasaran dan hanya menyerap sedikit tenaga kerja

Bagi daerah, pilihan tentu pada usaha yang A, primadona. Apabila tidak semuanya bisa masuk kategori unggul, maka tergantung permasalahan di daerah itu. Misalnya, daerah yang mempunyai banyak masalah pengangguran sebaiknya memilih usaha yang unggul dalam

menyerap tenaga kerja. Namun demikian, berkaitan dengan pendapatan mereka maka tidak boleh melupakan usaha-usaha yang unggul dalam omzet usahanya (seperti kategori D).

## HASIL STUDI KASUS JAWA TENGAH

Penelitian dilakukan dengan melakukan survei ke wilayah-wilayah yang mempunyai PDRB cukup tinggi namun tingkat LDR (*loan to deposit ratio*) bank umum relatif kecil (<80%), dengan responden para pengusaha kecil dan menengah (UKM) di sembilan sektor ekonomi, instansi terkait, dan perbankan. Berdasarkan data posisi Desember 2004, didapatkan 14 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan LDR bank umum < 80% dan PDRB daerah cukup tinggi, yaitu *Kab. Semarang, Kab. Grobogan, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab. Magelang, Kab. Kendal, Kab. Kebumen, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Jepara, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Cilacap, serta Kab. Banyumas.*

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM pada komoditi yang diteliti (3 pengusaha untuk 3 level usaha mikro, kecil menengah). Di samping itu wawancara juga akan dilakukan pada lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan perekonomian antara lain: Bappeda Pemprov. Jateng, Biro Ekonomi Pemprov. Jateng, Bappeda Dati II, Bagian Ekonomi Pemkab/Pemkot setempat, dinas teknis, dinas terkait, dan perbankan. Data sekunder berupa data PDRB/data perkembangan perekonomian dari masing-masing Kab/Kota di Jawa Tengah, data kredit perbankan, dan data lainnya yang akan dipergunakan sebagai studi pustaka. Data sekunder tersebut antara lain diperoleh dari berbagai instansi, internet, literatur dan lain-lain.

Penelitian dilakukan di 14 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan masing-masing 1 (satu) komoditi unggulan dari 5 sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) penyumbang PDRB terbesar. Pengambilan sampel untuk masing-masing komoditi dilakukan secara *purposive random sampling*. Jumlah usaha yang dijadikan sampel ditetapkan minimal 3 (tiga) perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha yang sama. Sementara itu, responden dari instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota yang akan diwawancarai di antaranya adalah:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Biro Perekonomian
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- Dinas Pertambangan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Perikanan
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- Dinas Koperasi dan UKM

Dari proses pemilihan sumber data sekunder yang terpenting di daerah dan diskusi dengan pejabat terkait di daerah, diperoleh 70 (tujuh puluh) komoditi unggulan di masing-masing daerah di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 4.** Tujuh puluh (70) Komoditas Unggulan di Provinsi Jawa Tengah

Kota/Kabupaten	Urutan Sektor	Komoditas
----------------	---------------	-----------

Kota/Kabupaten	Urutan Sektor	Komoditas
Kabupaten Cilacap	Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pertanian Jasa-jasa Pengangkutan dan Komunikasi	Pengolahan Gula Jawa Perdagangan Ikan Laut Padi Sawah Lembaga Pendidikan Komputer Angkutan Minibus
Kabupaten Banyumas	Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Jasa-jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Padi Sawah Pengolahan Gula Jawa Perdagangan Gula Jawa Biro Perjalanan dan Pariwisata Koperasi Simpan Pinjam
Kabupaten Kebumen	Pertanian Jasa-jasa Perdagangan, Hotel, dan Restoran Industri Pengolahan Pertambangan dan Penggalian	Padi Sawah Bengkel Sepeda Motor Rumah Makan Anyaman Pandan Pasir Batu
Kabupaten Magelang	Pertanian	Salak Nglumut
	Industri Pengolahan	Pengolahan Pahat Batu
	Jasa-jasa	Lembaga Kursus
	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan Slondok
Kabupaten Klaten	Pengangkutan dan Komunikasi	Minibus
	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan Mebel
	Pertanian	Padi Sawah
	Industri Pengolahan	Konveksi
Kabupaten Grobogan	Jasa-jasa	Bengkel Las
	Bangunan	Pembuatan Sumur Bur
	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Perdagangan Mebel
	Pertanian	Padi Sawah
Kabupaten Blora	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Rumah Makan
	Industri Pengolahan	PJTKI
	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Pemborong Bangunan
	Jasa-jasa	Koperasi Simpan Pinjam
Kabupaten Pati	Pertanian	Jagung
	Industri Pengolahan	Perdagangan Handicraft
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Pengolahan Handicraft
	Jasa-jasa	Koperasi Simpan Pinjam
Kabupaten Jepara	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Bengkel Sepeda Motor
	Industri Pengolahan	Tambak Udang
	Pertanian	Cor Kuningan
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Perdagangan Ikan Laut
Kabupaten Jepara	Jasa-jasa	Bengkel Kapal
	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Koperasi Simpan Pinjam
Kabupaten Jepara	Industri Pengolahan	Kain Tenun Ikat Troso
	Pertanian	Penggemukan Sapi

Kota/Kabupaten	Urutan Sektor	Komoditas
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran Jasa-jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Perdagangan Mebel Bengkel Sepeda Motor Koperasi Simpan Pinjam
Kabupaten Semarang	Industri Pengolahan	Pengolahan Kerupuk
	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan Krupuk
	Pertanian	Peternakan Sapi Perah
	Jasa-jasa	Perbengkelan
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Persewaan Alat Pesta
Kabupaten Kendal	Industri Pengolahan	Pembuatan Mebel
	Pertanian	Padi Sawah
	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan Pakaian Jadi
	Jasa-jasa	PJTKI
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Persewaan Komputer
Kota Tegal	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan Makanan
	Pertanian	Penangkapan Hasil Laut
	Industri Pengolahan	Pengolahan Ikan
	Pengangkutan dan Komunikasi	Angkutan Kota
	Jasa-jasa	Bengkel Las
Kota Surakarta	Industri Pengolahan	Pengolahan Batik
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Perdagangan Batik
	Jasa-jasa	Bengkel Sepeda Motor
	Bangunan	Pemborong Bangunan
	Pengangkutan dan Komunikasi	Angkutan Kota
Kota Pekalongan	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan Pakaian Jadi
	Industri Pengolahan	Pengolahan Batik
	Pertanian	Penangkapan Hasil Laut
	Jasa-jasa	Bengkel Las
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Persiapan Alat Pesta

Sumber: PDRB Riel 2004 dan Data Primer, diolah

Karena perbedaan kondisi daerah, visi daerah, dan prioritas daerah maka terlihat adanya variasi komoditi unggulan daerah. Variasi tersebut dapat dikembangkan menjadi spesialisasi produksi antar daerah. Dengan spesialisasi tersebut diharapkan semakin tinggi harga yang diperoleh oleh produsen, sehingga bisa meningkat kesejahteraan.

Analisis selanjutnya adalah membandingkan antara komoditi unggulan yang dipilih/ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan perbankan. Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk membuat ranking komoditas unggulan, diantara 5 komoditas yang terpilih. Dalam tabel 5, kolom persentase menunjukkan bobot pentingnya suatu usaha menurut pejabat di daerah. Nilai total bobot masing-masing kabupaten/kota adalah 100 persen. Selain terlihat variasi komoditi unggulan daerah, juga terdapat perbedaan persentase bobot pentingnya suatu komoditi antar daerah.

Perbankan secara tidak langsung melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha. Dalam hal ini, perbankan diminta membuat ranking terhadap 5 aspek usaha, aspek mana yang terpenting dalam penentuan kelayakan usaha. Hasil ranking aspek usaha ada dalam lampiran. Hasil ranking 5 aspek tersebut ada dalam lampiran. Masing-masing perbankan daerah memberikan bobot yang berbeda terhadap 5 aspek usaha. Hal ini wajar mengingat perbedaan kondisi ekonomi dan bisnis di daerah.

Untuk penilaian kelayakan usaha, dari 70 komoditas yang ada di daerah, masing-masing dipilih 3 pengusaha kecil/menengah sebagai responden. Metode analisis kelayakan usaha dilakukan berdasarkan 5 aspek usaha. Masing-masing usaha dinilai (*scoring*) terhadap 5 aspek usahanya, nilai antara 1 sampai 4. Nilai ini kemudian dikalikan dengan ranking 5 aspek usaha yang dilakukan oleh perbankan. Dengan demikian, nilai masing-masing usaha sudah dibobot dengan menggunakan ranking berdasarkan persepsi perbankan.

Untuk mengelompokkan komoditi ke dalam kategori Cukup Layak, Layak, dan Sangat Layak dipergunakan nilai rata-rata dan standar deviasi dari ketujuh puluh komoditas. Interval nilai daerah kelayakan adalah **Cukup Layak** jika nilainya kurang dari 0,94; **Layak** jika nilainya antara 0,94 dan 1,21. dan **Sangat Layak** jika nilainya lebih dari 1,21. Hasilnya disajikan dalam kolom nilai pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kelayakan Komoditas Unggulan di Jawa Tengah

Pemerintah Kota/Kabupaten			Perbankan			
Peringkat	Komoditas	Bobot	Peringkat	Komoditas	Nilai	Kelayakan
<b>Kabupaten Cilacap</b>			<b>Kabupaten Cilacap</b>			
1	Padi Sawah	41,66%	1	Lembaga Pendidikan Komputer	1,24	SL
2	Pengolahan Gula Jawa	20,37%	2	Perdagangan Ikan Laut	1,07	L
3	Perdagangan Ikan Laut	16,47%	3	Padi Sawah	1,00	L
4	Angkutan Minibus	11,56%	4	Angkutan Minibus	0,88	CL
5	Lembaga Pendidikan Komputer	9,95%	5	Pengolahan Gula Jawa	0,87	CL
<b>Kabupaten Banyumas</b>			<b>Kabupaten Banyumas</b>			
1	Padi Sawah	36,24%	1	Koperasi Simpan Pinjam	1,38	SL
2	Perdagangan Gula Jawa	25,01%	2	Biro Perjalanan dan Pariwisata	1,29	SL
3	Pengolahan Gula Jawa	21,13%	3	Perdagangan Gula Jawa	1,20	L
4	Koperasi Simpan Pinjam	9,11%	4	Pengolahan Gula Jawa	1,12	L
5	Biro Perjalanan dan Pariwisata	8,50%	5	Padi Sawah	0,97	L
<b>Kabupaten Kebumen</b>			<b>Kabupaten Kebumen</b>			
1	Padi Sawah	47,52%	1	Anyaman Pandan	1,13	L
2	Anyaman Pandan	16,35%	2	Rumah Makan	1,13	L
3	Rumah Makan	15,48%	3	Pasir Batu	1,07	L
4	Pasir Batu	11,53%	4	Bengkel Sepeda Motor	1,06	L
5	Bengkel Sepeda Motor	9,12%	5	Padi Sawah	0,91	CL
<b>Kabupaten Magelang</b>			<b>Kabupaten Magelang</b>			
1	Salak Nglumut	34,94%	1	Lembaga Kursus	1,21	L
2	Pengolahan Pahat Batu	21,08%	2	Minibus	1,06	L
3	Perdagangan Slondok	20,02%	3	Pengolahan Pahat Batu	1,06	L

4	Lembaga Kursus	15,00%	4	Perdagangan Slondok	0,99	L
5	Minibus	8,96%	5	Salak Nglumut	0,95	L
<b>Kabupaten Klaten</b>			<b>Kabupaten Klaten</b>			
1	Pengolahan Konveksi	33,26%	1	Pengolahan Konveksi	1,15	L
2	Perdagangan Mebel	28,21%	2	Pembuatan Sumur Bur	1,09	L
3	Bengkel Las	24,81%	3	Perdagangan Mebel	1,06	L
4	Padi Sawah	7,91%	4	Bengkel Las	1,03	L
5	Pembuatan Sumur Bur	5,82%	5	Padi Sawah	0,89	CL
<b>Kabupaten Grobogan</b>			<b>Kabupaten Grobogan</b>			
1	Padi Sawah	43,45%	1	Koperasi Simpan Pinjam	1,30	SL
2	PJTKI	26,29%	2	Rumah Makan	1,22	SL
3	Koperasi Simpan Pinjam	15,88%	3	PJTKI	0,98	L
4	Pemborong Bangunan	7,45%	4	Pemborong Bangunan	0,97	L
5	Rumah Makan	6,93%	5	Padi Sawah	0,77	CL
<b>Kabupaten Blora</b>			<b>Kabupaten Blora</b>			
1	Jagung	32,34%	1	Koperasi Simpan Pinjam	1,46	SL
2	Pengolahan Handicraft	23,33%	2	Pengolahan Handicraft	1,15	L
3	Perdagangan Handicraft	22,88%	3	Perdagangan Handicraft	1,03	L
4	Koperasi Simpan Pinjam	11,54%	4	Bengkel Sepeda Motor	1,01	L
5	Bengkel Sepeda Motor	9,92%	5	Jagung	0,97	L
<b>Kabupaten Pati</b>			<b>Kabupaten Pati</b>			
1	Tambak Udang	43,58%	1	Koperasi Simpan Pinjam	1,21	SL
2	Perdagangan Ikan Laut	25,91%	2	Perdagangan Ikan Laut	1,14	L
3	Cor Kuningan	12,75%	3	Cor Kuningan	1,08	L
4	Bengkel Kapal	8,96%	4	Tambak Udang	0,94	L
5	Koperasi Simpan Pinjam	8,81%	5	Bengkel Kapal	0,93	CL
<b>Kabupaten Jepara</b>			<b>Kabupaten Jepara</b>			
1	Perdagangan Mebel	44,20%	1	Koperasi Simpan Pinjam	1,30	SL
2	Kain Tenun Ikat Troso	23,27%	2	Perdagangan Mebel	1,08	L
3	Penggemukan Sapi	12,46%	3	Kain Tenun Ikat Troso	1,08	L
4	Koperasi Simpan Pinjam	11,87%	4	Bengkel Sepeda Motor	0,90	CL
5	Bengkel Sepeda Motor	8,20%	5	Penggemukan Sapi	0,89	CL
<b>Kabupaten Semarang</b>			<b>Kabupaten Semarang</b>			
1	Peternakan Sapi Perah	31,92%	1	Perdagangan Kerupuk	1,10	L
2	Perdagangan Kerupuk	24,04%	2	Perbengkelan	1,09	L
3	Perbengkelan	20,36%	3	Persewaan Alat Pesta	1,08	L
4	Pengolahan Kerupuk	11,97%	4	Peternakan Sapi Perah	0,97	L
5	Persewaan Alat Pesta	11,71%	5	Pengolahan Kerupuk	0,95	L
<b>Kabupaten Kendal</b>			<b>Kabupaten Kendal</b>			
1	PJTKI	38,63%	1	PJTKI	1,08	L
2	Pengolahan Mebel	21,66%	2	Perdagangan Pakaian Jadi	0,96	L
3	Perdagangan Pakaian Jadi	20,70%	3	Persewaan Komputer	0,90	CL
4	Padi Sawah	13,17%	4	Pengolahan Mebel	0,89	CL
5	Persewaan Komputer	5,84%	5	Padi Sawah	0,87	CL

	<b>Kota Tegal</b>			<b>Kota Tegal</b>		
1	Perdagangan Makanan	28,21%	1	Perdagangan Makanan	1,24	SL
2	Angkutan Kota	23,09%	2	Bengkel Las	1,22	SL
3	Bengkel Las	19,47%	3	Pengolahan Ikan	1,18	L
4	Pengolahan Ikan	18,84%	4	Penangkapan Hasil Laut	1,17	L
5	Penangkapan Hasil Laut	10,40%	5	Angkutan Kota	1,08	L
	<b>Kota Surakarta</b>			<b>Kota Surakarta</b>		
1	Pengolahan Batik	54,77%	1	Bengkel Sepeda Motor	1,33	SL
2	Perdagangan Batik	16,05%	2	Pengolahan Batik	1,18	L
3	Bengkel Sepeda Motor	14,86%	3	Pemborong Bangunan	1,17	L
4	Angkutan Kota	7,47%	4	Perdagangan Batik	1,08	L
5	Pemborong Bangunan	6,85%	5	Angkutan Kota	0,95	L
	<b>Kota Pekalongan</b>			<b>Kota Pekalongan</b>		
1	Perdagangan Pakaian Jadi	32,75%	1	Perdagangan Pakaian Jadi	1,20	L
2	Penangkapan Hasil Laut	25,59%	2	Pengolahan Batik	1,15	L
3	Pengolahan Batik	23,06%	3	Persewaan Alat Pesta	1,11	L
4	Bengkel Las	11,80%	4	Bengkel Las	1,05	L
5	Persewaan Alat Pesta	6,80%	5	Penangkapan Hasil Laut	1,02	L

Sumber: Data primer, diolah

Dengan melihat tabel 5 dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kelompok komoditas:

1. komoditas yang unggul menurut pemerintah kota/kabupaten dan layak menurut perbankan,
2. komoditas yang unggul menurut pemerintah namun dinilai tidak layak oleh perbankan,
3. komoditi yang kurang unggul namun dinilai layak menurut perbankan.

**Kelompok pertama**, komoditas yang unggul dan layak yaitu Perdagangan Mebel di Kabupaten Jepara, Anyaman Pandan di Kabupaten Kebumen, PJTKI di Kabupaten Kendal, Pengolahan Konveksi di Kabupaten Klaten, Perdagangan Ikan Laut di Kabupaten Pati, Perdagangan Pakaian Jadi di Pekalongan, Perdagangan Kerupuk di Kabupaten Semarang, Pengolahan Batik di Kota Surakarta, dan Perdagangan Makanan di Kota Tegal.

**Kelompok kedua**, komoditas yang dianggap unggul menurut pemerintah kota/kabupaten tetapi tidak layak menurut perbankan adalah Padi Sawah di Kabupaten Banyumas, Jagung di Kabupaten Blora, Padi Sawah di Kabupaten Grobogan, Padi Sawah di Kabupaten Kebumen, Pengolahan Mebel di Kabupaten Kendal, Salak Nglumut di Kabupaten Magelang, Tambak Udang di Kabupaten Pati, Penangkapan Hasil Laut di Kota Pekalongan, Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Semarang, Perdagangan Batik di Kota Surakarta, dan Angkutan Kota di Kota Tegal.

**Kelompok ketiga**, komoditas yang layak menurut perbankan namun tidak unggul menurut pemerintah kota/kabupaten adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Biro Perjalanan Pariwisata di Kabupaten Banyumas, Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Blora, Lembaga Pendidikan Komputer di Kabupaten Cilacap, Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara, Lembaga Kursus di Kabupaten Magelang, dan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Pati.

Salah satu sumber masalah tidak majunya komoditas unggulan daerah adalah adanya komoditas unggulan yang dinilai tidak layak oleh perbankan. Terhadap kebijakan penentuan komoditas unggulannya, daerah mestinya juga melihat bagaimana komoditas tersebut selaras dengan penilaian perbankan. Strategi penentuan komoditas unggulan tanpa melihat kelayakan

perbankan menuntut daerah mengalokasikan dana (APBD) untuk pengembangan produk unggulan tersebut.

Selain itu, pilihan terhadap komoditas unggulan daerah mestinya menyangkut masalah yang dihadapi oleh daerah. Apabila daerah menghadapi masalah pengangguran, maka pilihan produk unggulan mestinya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun juga harus diingat, produk tersebut juga harus bisa bersaing di pasar. Sebagai metode pemilihan, analisis keunggulan komparatif yang berdasarkan RCA bisa dipergunakan.

Dengan menggunakan kriteria RCA berdasarkan 3 kriteria: jumlah perusahaan (JMLH), nilai tambah (VA) dan jumlah tenaga kerja yang terserap (TK), maka diperoleh hasil sebagai berikut. Komoditas termasuk kategori primadona apabila memiliki nilai RCA > 1 untuk ketiga kategori. Sebagaimana dilaporkan dalam tabel 6, Untuk kelompok industri 2 digit, maka Kabupaten Cilacap memiliki industri primadona untuk kelompok ISIC 33 dan 35; Banyumas 33, 35 dan 36; Kebumen 36; Magelang 33 dan 39; Klaten 31 dan 33; Grobogan 31, 33, dan 35; Blora 33 dan 36; Pati 31 dan 38; Jepara 33; Semarang 35; Kendal 33; Tegal 33, 37, dan 39; Surakarta 32 dan 35; dan Pekalongan 31 dan 35. Dengan berbekal pilihan sektor primadona ini, daerah dapat merivisi dan mempertajam analisis sektor unggulannya agar dapat dibiayai oleh sektor perbankan di samping oleh anggaran daerah (APBD).

Pilihan kedua (*second best*) adalah kelompok industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan sekaligus memiliki keunggulan dalam nilai tambah sehingga mampu menguasai pasar. Dalam tabel 2, kelompok industri ini masuk kategori D. Bagi daerah Cilacap kelompok industri kategori D ini adalah industri ISIC 36. Untuk daerah lain: Kebumen 33; Magelang 32, 34, dan 38; Klaten 34; Grobogan 34; Semarang 32; Kendal 36, 38; Tegal 31 dan Surakarta 34.

**Tabel 6.** Sektor Unggulan Berdasarkan Analisis RCA

	ISIC	CILACAP	BANYUMAS	KEBUMEN	MAGELANG	KLATEN	GROBOGAN	BLORA
JMLH	31	1.8	1.7	0.3	1.4	1.5	2.2	1.5
VA	31	0.7	0.7	0.5	0.1	1.1	1	0.9
TK	31	0.8	1.2	0.5	0.4	1.6	2.4	1.7
JMLH	32	0.1	0.1	0.1	0.5	1	0	0
VA	32	0.2	0	0	1	0.6	0	0
TK	32	0.3	0	0	1	0.6	0	0
JMLH	33	3.2	2.7	0.6	2.2	2.6	3.1	5.7
VA	33	2.7	4.5	2	2	3.8	2.4	10.9
TK	33	3	3.3	1.1	2.1	2.6	2.7	5.7
JMLH	34	0.4	0	0.5	0.8	0.6	3.2	0
VA	34	0	0	1.9	1.8	3.7	1.4	0
TK	34	0.1	0	0.6	1.3	1.8	1.9	0
JMLH	35	2.9	1.3	0.7	0.7	0.2	1.4	0
VA	35	2.7	4.3	0.9	0.3	0.2	5.6	0
TK	35	4	3.2	0.7	0.3	0.1	1.8	0
JMLH	36	0.3	1.8	9.2	1.5	0.2	0.7	2.8

VA	36	10.6	1.5	16.3	0.8	0.2	0.6	2.3
TK	36	2.6	1.9	19.8	1.3	0.3	1	3.5
JMLH	37	0	4	0	0	0.9	0	0
VA	37	0	0.2	0	0	0.1	0	0
TK	37	0	1.6	0	0	0.4	0	0
JMLH	38	0.3	0.4	0.1	0.9	2.1	0	0.7
VA	38	0.4	0.3	0.3	6.8	2	0	0.1
TK	38	0.8	0.5	0.2	4.6	2.1	0	0.5
JMLH	39	0.9	0.5	0.1	1.8	0.3	0	2.1
VA	39	0	1.6	0.7	4.7	0.4	0	15.1
TK	39	0.2	0.7	0.2	2.2	0.2	0.4	1.4

	ISIC	PATI	JEPARA	SEMARANG	KENDAL	TEGAL	SURAKARTA	PEKALONGAN
JMLH	31	1.7	0.1	0.8	1	0.9	0.8	1.2
VA	31	2.7	0.3	0.3	0.1	1.6	0.6	1.3
TK	31	3	0.2	0.3	0.2	1.9	0.7	1.4
JMLH	32	0.1	0.4	1	0.5	0.5	1.8	2.5
VA	32	0	0.1	2.2	1.5	0.6	1.8	1.7
TK	32	0.1	0.2	1.8	0.5	0.5	1.5	1.7
JMLH	33	1.5	11.9	4	4.4	2.5	0.4	0.2
VA	33	0.8	14.8	0.8	4.2	1.6	0.4	0
TK	33	0.6	11.8	1.6	6.2	1.1	0.2	0.1
JMLH	34	0.2	0	0.6	0.5	0.5	3	0.2
VA	34	0.1	0	0.5	0.1	0.1	2.4	0
TK	34	0.1	0	0.3	0.4	0.1	3.9	0.1
JMLH	35	0.2	0.1	2.3	2.1	0.8	2.2	0.5
VA	35	0.1	0.2	1	0.5	0.6	1.2	0.1
TK	35	0.1	0.1	1.1	1.7	0.7	1.3	0.2
JMLH	36	0.8	0.2	0.7	0.5	1.5	0.2	0.1
VA	36	0.3	0.2	1	3.6	0.3	0.1	0.1
TK	36	0.6	0.2	0.9	1	0.7	0.1	0.1
JMLH	37	3.1	0	0	9.6	5.6	0	0
VA	37	0.3	0	0	0.7	6.7	0	0
TK	37	1	0	0	4.1	2.2	0	0
JMLH	38	3.6	0	0.2	0.9	2.8	0.4	0.4
VA	38	1.3	0	0	1.4	0.9	0.2	0.2
TK	38	2.5	0.1	0.2	1.8	1.4	0.3	0.2
JMLH	39	0.8	0.1	0.9	0.9	1.2	0.8	0.3

VA	39	1.1	0.5	0.2	0	5	0.4	0.1
TK	39	0.6	0.1	0.2	0.1	3	0.3	0.1

KodeISIC

- 31 industri makanan, minuman dan tembakau
- 32 industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit
- 33 industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya
- 34 industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan
- 35 industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi batubara karet dan plastik
- 36 industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batubara
- 37 industri logam dasar
- 38 yaitu industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya.
- 39 industri pengolahan lainnya

Evaluasi terhadap penentuan produk unggulan dilakukan dengan menggunakan RCA, yaitu apakah produk unggulan masuk dalam kategori industri yang primadona. Apabila produk unggulan termasuk di dalam kelompok industri primadona, maka komoditi unggulan ini memiliki kelebihan secara relatif dalam hal jumlah unit usahanya, penyerapan tenaga kerja, atau omzet usahanya. Apabila produk unggulan tidak termasuk di dalam kelompok industri primadona, maka diragukan kemampuan relatif unit usaha produk unggulan dalam jumlah unit usaha, kemampuan menyerap tenaga kerja, atau omzet usaha.

Tabel 7 berikut ini menyajikan kelompok industri primadona di masing-masing daerah sampel dan komoditi unggulan yang termasuk di dalam kelompok industri yang bersangkutan. Ada beberapa daerah yang memiliki kelompok industri primadona, namun dari 5 komoditi unggulan terpilih ternyata tidak terdapat komoditi yang masuk kelompok industri primadona. Sebagai contoh, kabupaten Cilacap memiliki kelompok industri primadona 33 (industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya) dan 35 (industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi batubara karet dan plastik), namun dari 5 komoditi unggulan yang dipilih pemerintah daerah ternyata tidak satupun komoditi yang berasal dari kelompok industri primadona tersebut. Kabupaten Kebumen memiliki industri primadona 36 (industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batubara) dan mempunyai produk unggulan (tambang pasir dan batu) yang merupakan salah satu produk di dalam kelompok industri primadona. Dengan demikian, terlihat beberapa daerah (Cilacap, Banyumas, Magelang, Semarang) yang produk unggulannya diragukan kemampuannya secara relatif dalam hal jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja maupun omzet usaha.

**Tabel 7.** Kelompok Industri Primadona dan Komoditi Unggulan

No	Daerah	Industri Primadona	Komoditi
1	Cilacap	33, 35	-
2	Banyumas	33, 35, 36	-
3	Kebumen	36	36 pasir batu
4	Magelang	33, 39	-
5	Klaten	31, 33	33 mebel
6	Grobogan	31, 33, 35	31 rumah makan
7	Blora	33, 36	33 handicraft

8	Pati	31, 38	38 cor kuningan
9	Jepara	33	33 mebel
10	Semarang	35	-
11	Kendal	33	33 mebel
12	Tegal	37	37 bengkel las
13	Surakarta	32, 35	32 batik
14	Pekalongan	31, 32	32 batik

Sumber: Data Primer, diolah

## KESIMPULAN

Paper ini membahas analisis komoditas unggulan daerah. Penulis mencoba mengevaluasi penentuan komoditas unggulan daerah dengan menggunakan persepsi perbankan dalam menilai kelayakan usaha berdasarkan 5 aspek: pemasaran; teknis dan produksi; manajemen dan legalitas; keuangan; sosial ekonomi dan lingkungan. Metode penentuan komoditas unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering tidak sinkron dengan analisis kelayakan unit usaha yang dilakukan oleh dunia perbankan. Oleh karena itu, sinkronisasi diperlukan agar dunia perbankan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah.

Evaluasi terhadap penentuan produk unggulan daerah dengan menggunakan RCA menunjukkan bahwa tidak semua produk unggulan termasuk di dalam kelompok industri primadona. Dengan berdasarkan analisis RCA yang menggabungkan keunggulan relatif dalam hal: jumlah usaha, nilai tambah dan jumlah tenaga kerja bisa mendeteksi kriteria jenis usaha/sektor yang primadona maupun sektor yang dapat menjadi penopang menyelesaikan masalah ekonomi di daerah (kesempatan kerja dan pendapatan).

Pemilihan sektor/produk unggulan dan kemudian mengembangkannya, sebagaimana dilakukan pemerintah daerah, termasuk kategori strategi memilih pemenang (*pick the winner*). Data yang lengkap mengenai kinerja sektor/produk unggulan di masa lalu akan sangat mendukung pemilihan sektor/produk unggulan ini. Oleh karena itu kelengkapan basis data merupakan kunci pengembangan komoditas unggulan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aylward, A., 'Trend in Venture Capital Finance in Developing Countries'. *International Finance Corporation (IFC) Discussion Paper No.36*. the World Bank, Washington D.C., 1997.
- Boedjuwono, Nugroho, *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- Bank Indonesia, *Sejarah Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil*, Bank Indonesia, Jakarta, 2001.
- , *Annual Report 2002*, Jakarta 2002.
- , *Pola Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU BI No.23 Tahun 1999*, Jakarta 2002, tidak dipublikasikan.
- Braverman and JL Gausch, *Microcredit in the Developing Countries: A Case Study of Latin America*. McMillan, Rio de Janeiro, 1986.
- Clive Grey, et.al, *Pengantar Evaluasi Proyek*, edisi kedua, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1992.

- Hale, R.H., *Credit Analysis A Complete Guide*. John Wiley & Sons, 1989.
- Pashigian, B.P., *Price Theory and Publications*. McGraw Hill., 1995.
- PSEKP-BI: *Lending Model, untuk 70 komoditi unggulan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, 2006
- PSE-KP UGM, *Baseline Economic Survei Provinsi DIY*, kerjasama dengan Biro Kredit Kantor Pusat Bank Indonesia, 2005
- PSE-KP UGM, *Penelitian Komoditi Berorientasi Ekspor (SIABE) Provinsi DIY*, kerjasama dengan Biro Kredit Kantor Pusat Bank Indonesia, 2005
- PSE-KP UGM, *Pola Pembiayaan 10 Komoditi*, kerjasama dengan Biro Kredit Kantor Pusat Bank Indonesia, 2004
- Sanders, A. *Financial Institutions Management*, McGraw Hill., 2000.
- Sinden, J.A. and D.J. Thampapillai, *Introduction to Benefit-Cost Analysis*. Longman Australia Pty.Ltd., 1995.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Penerbit Salemba Pusat., 2002.
- Widodo, Tri. *Efektivitas Pengucuran Kredit oleh Model Ventura: Studi Komparasi dengan Sumber Kredit Lain*. Penelitian didanai oleh MM-UGM. Tidak dipublikasikan., 1996.
- Widodo, Tri. *Penelitian Dampak Pola Pembiayaan Usaha Skala Mikro terhadap Kinerja Bank dan Nasabah, kerja sama Bank Indonesia dan PSE-KP UGM*. Tidak dipublikasikan, 2003.

## LAMPIRAN 1

### Bobot Kepentingan Aspek Penilaian Kelayakan Kredit

1. Kab. Cilacap		Bobot	2. Kab. Banyumas		Bobot
1	Pemasaran	29,62%	1	Pemasaran	26,30%
2	Manajemen dan Legalitas	25,70%	2	Teknis dan Produksi	25,00%
3	Keuangan	19,61%	3	Keuangan	17,31%
4	Teknis dan Produksi	13,13%	4	Manajemen dan Legalitas	15,74%
5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	11,94%	5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	15,66%
3. Kab. Kebumen		Bobot	4. Kab. Magelang		Bobot
1	Teknis dan Produksi	23,96%	1	Pemasaran	31,32%

2	Manajemen dan Legalitas	23,81%	2	Keuangan	19,35%
3	Keuangan	23,25%	3	Manajemen dan Legalitas	17,25%
4	Pemasaran	21,51%	4	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	17,25%
5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	7,47%	5	Teknis dan Produksi	14,84%
<b>5. Kab. Klaten</b>			<b>6. Kab. Grobogan</b>		
		<b>Bobot</b>			<b>Bobot</b>
1	Pemasaran	29,97%	1	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	31,15%
2	Keuangan	25,34%	2	Keuangan	24,62%
3	Manajemen dan Legalitas	20,22%	3	Pemasaran	17,18%
4	Teknis dan Produksi	14,07%	4	Manajemen dan Legalitas	16,45%
5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	10,40%	5	Teknis dan Produksi	10,60%
<b>7. Kab. Blora</b>			<b>8. Kab. Pati</b>		
		<b>Bobot</b>			<b>Bobot</b>
1	Pemasaran	28,76%	1	Pemasaran	35,35%
2	Keuangan	22,62%	2	Manajemen dan Legalitas	22,71%
3	Teknis dan Produksi	20,37%	3	Teknis dan Produksi	16,46%
4	Manajemen dan Legalitas	20,34%	4	Keuangan	14,26%
5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	7,91%	5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	11,22%
<b>9. Kab. Jepara</b>			<b>10. Kab. Semarang</b>		
		<b>Bobot</b>			<b>Bobot</b>
1	Keuangan	35,62%	1	Keuangan	35,23%
2	Pemasaran	28,75%	2	Pemasaran	22,12%
3	Manajemen dan Legalitas	20,56%	3	Manajemen dan Legalitas	20,26%
4	Teknis dan Produksi	9,61%	4	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	12,19%
5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	5,46%	5	Teknis dan Produksi	10,20%
<b>11. Kab. Kendal</b>			<b>12. Kota Tegal</b>		
		<b>Bobot</b>			<b>Bobot</b>
1	Manajemen dan Legalitas	25,73%	1	Pemasaran	42,31%
2	Keuangan	23,64%	2	Keuangan	20,13%
3	Pemasaran	18,40%	3	Teknis dan Produksi	17,66%
4	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	17,89%	4	Manajemen dan Legalitas	12,50%
5	Teknis dan Produksi	14,34%	5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	7,39%
<b>13. Kota Surakarta</b>			<b>14. Kota Pekalongan</b>		
		<b>Bobot</b>			<b>Bobot</b>
1	Keuangan	35,47%	1	Pemasaran	31,22%
2	Manajemen dan Legalitas	22,91%	2	Keuangan	30,80%
3	Pemasaran	20,51%	3	Manajemen dan Legalitas	21,40%
4	Teknis dan Produksi	12,06%	4	Teknis dan Produksi	10,85%
5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	9,05%	5	Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	5,73%

Sumber: Data Primer, diolah